

Bulan :

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2 0 2 0



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	Kompas	Sindo	Tempo
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		Indopos	Pos Kota	Warta Kota

Ada Dugaan Korupsi dan TPPU

Komisi B Bakal Panggil Jajaran Perumda Pembangunan Sarana Jaya

Gambir, Warta Kota

Komisi B DPRD DKI Jakarta berencana memanggil Perumda Pembangunan Sarana Jaya terkait dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) terkait pembelian lahan pada 2018-2020. Kasus ini bahkan tengah diselidiki Mabes Polri, dan Perumda Sarana Jaya telah dipanggil untuk diperiksa.

Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta, Gilbert Simanjuntak, menyatakan, lembaganya bakal memanggil Direktur Utama Perumda Pembangunan Sarana Jaya, Yoory C Pinontoan dan jajarannya. Pemanggilan Yoory dibutuhkan untuk mengklarifikasi kabar pemeriksaan BUMD DKI Jakarta itu di kepolisian terkait TPPU pembelian aset.

"Kami akan minta klarifikasi karena sudah gerah betul dengan pemberitaan ini. Pemanggilan dilakukan sece-

patnnya, bisa pekan ini atau pekan depan," kata Gilbert, Selasa (10/3). Gilbert mengatakan, di Komisi B sempat ada perbedaan pandangan antara pendukung Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dengan fraksi lain. Bila rapat masih sulit digelar, pihaknya bakal meminta pimpinan Komisi B yang lain untuk proaktif mengadakan rapat tersebut.

"Untuk mengadakan rapat belum ada titik temu pembicaraan antara anggota Komisi B fraksi pendukung Anies dengan anggota fraksi lain. Kami juga belum tahu uraian masalahnya seperti apa, jadi tidak bisa menyimpulkan kasus ini dulu," ujar Gilbert.

Menurut politisi PDIP ini, peran Komisi B sangat strategis dalam mengawal pembangunan di Jakarta. Sebab, katanya, tidak sedikit

proyek penugasan diserahkan ke BUMD terkait, seperti PT Jakarta Propertindo, Perumda Pembangunan Sarana Jaya dan lainnya.

Termasuk dengan Perumda Pembangunan Sarana Jaya. Gilbert menganggap, kasus dugaan adanya korupsi dan tindak pidana pencucian uang dalam pembelian aset oleh Perumda Pembangunan Sarana Jaya terjadi karena lemahnya pengawasan. Untuk itu, harapnya, setiap BUMD terkait harus memaparkan rencana pembangunan terlebih dahulu sebelum dieksekusi. (faf)

Sudah Sesuai Prosedur

Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta, Abdul Aziz, membantah kabar ada upaya mempersulit pemanggilan Perumda Pembangunan Sarana Jaya. "Kabar itu tidak benar. Akan kami panggil pekan depan .. insyaallah. Sampai sekarang juga belum jelas yang mana kasusnya karena semuanya masih dicek," kata Aziz, Selasa (10/3). Sementara, Humas

Perumda Pembangunan Sarana Jaya, Keren Margaret Vicer, mengakui, telah menerima surat panggilan dari Bareskrim Polri untuk diminta keterangan soal pengadaan tanah. Dia memastikan, pengadaan tanah yang dilakukan Perumda Pembangunan Sarana Jaya telah sesuai prosedur.

"Pastinya kami selalu melakukan pengadaan tanah sesuai SOP perusahaan. Dan

memang beberapa karyawan dipanggil untuk diminta keterangan dan kami selalu siap dan kooperatif akan hal itu," ujar Keren.

Sedangkan Direktur Utama Perumda Pembangunan Sarana Jaya, Yoory C Pinontoan, mengaku beberapa stafnya ada yang diperiksa Mabes Polri. Namun dia belum bisa membeberkannya dengan alasan masih ditangani oleh penyidik. "Bukan hanya DP Rp 0 rupiah (jadi kasusnya macam-macam)," kata Yoory. (faf)